

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia.

Ketimpangan pembangunan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga berdampak kepada masih tingginya kemiskinan di Indonesia. Menanggapi persoalan tersebut, adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dalam pembangunan yakni dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Desa sebagai suatu wilayah dan daerah otonom yang terletak pada kedudukan terendah secara bersamaan akan menjadi pusat dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah (Wibawa, 2004).

Desa secara administratif mempunyai arti yakni unit pemerintahan terkecil yang dikepalai oleh kepala desa dari sebuah system pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu struktur Pemerintahan yang secara politis memiliki hak tertentu untuk mengurus, mengatur dan mengelola warga atau komunitasnya secara tersendiri.

Desa merupakan bentuk entitas dan wajah terdepan dalam segala proses pembangunan di

negara dan bangsa ini, oleh sebab itu desa mempunyai arti dan posisi sangat strategis sebagai basis pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat dan juga sebagai fasilitator untuk pemenuhan hak-hak masyarakat rakyat pribumi.

Pemerintah desa merupakan alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, adapun fungsinya disini adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dalam mencapai pemerataan pembangunan nasional dan menunjang kesejahteraan masyarakat (Widjaja, 2002).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Dana Desa merupakan bentuk dari pemenuhan hak Desa untuk menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahannya agar tumbuh maju dan bisa mengikuti perkembangan dari desa lain dan desa itu sendiri berdasarkan otonomi asli, demokratisasi, keaneka keragaman, partisipasi, pemberdayaan SDM, masyarakat serta meningkatkan peran dan keterlibatan Pemerintah terkecil (desa) yang berperan sebagai kaki tangan pemerintahan pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dana Desa tahun 2015 telah dikeluarkan mencapai Rp 20,7 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 74.094 desa yang ada di seluruh Indonesia. Secara bertahap Dana Desa (DD) akan terus berubah dan terus meningkat hingga tahun 2017 di perkirakan rata-rata perdesa secara Nasional mencapai Rp 1 miliar. 82 Nagari yang ada di Kabupaten Solok telah menerima kucuran dari Dana Desa tersebut. Dana yang telah dicairkan dan diterima masing-masing Nagari bervariasi disesuaikan dengan ketentuan yakni tingkat kemiskinan, keterjangkauan, luas wilayah dan jumlah penduduk. Kabupaten Solok tahun 2016 menerima Dana Desa dikisaran jumlah Rp

50,220,928,000.00. Jumlah dana yang diperoleh setiap Nagari juga bervariasi mulai dari Rp 610,408,127.00 juta hingga Rp 881,145,163.00 juta per nagari.

Menindak lanjuti peraturan Pemerintah Kabupaten Solok yang telah merealisasikan kebijakan pemberian Dana Desa (DD) kepada setiap Nagari. Pemerintah Daerah setempat telah mengeluarkan Peraturan Bupati No 5 tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Desa/Nagari.

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Solok melalui Dana Desa (DD) yaitu hampir mencapai Rp 1 miliar/Desa, maka muncul pertanyaan apakah Desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa Desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan Dana Desa diberlakukan, Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

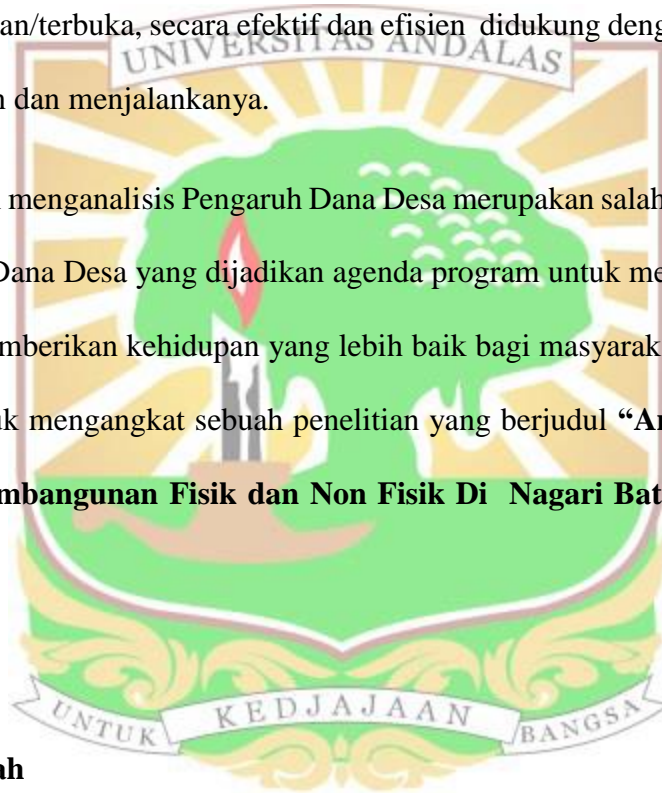
Selain itu Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, khususnya dalam pembangunan fisik dan non fisik secara lebih efektif dan efisien, maka Pemerintah Desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Pemerintah Desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.

- Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.

Analisis pengaruh Dana Desa (DD) merupakan salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana Pemerintahan Desa tersebut mampu menjalankan dan melaksanakan program dalam pembangunan fisik dan non fisik di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok. Tujuan dari diterapkannya prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat lebih giat untuk meningkatkan etos kerja secara transparan/terbuka, secara efektif dan efisien didukung dengan komitmen yang kuat dalam melaksanakan dan menjalankannya.

Mengukur dan menganalisis Pengaruh Dana Desa merupakan salah satu cara yang terdapat dalam pengelolaan Dana Desa yang dijadikan agenda program untuk melihat sejauh mana Dana Desa itu mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Desa. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Fisik dan Non Fisik Di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok.”**



1.2 Rumusan Masalah

Menganalisis pengaruh Dana Desa merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintahan desa, perwujudan dapat direalisasikan dengan melihat aspek pembangunan fisik dan non fisik di Nagari Batang Barus.

Tujuan dari penerapan nilai-nilai tersebut supaya Pemerintah Desa dapat meningkatkan etos kerja secara transparan, efektif dan efisien yang didukung dengan komitmen yang kuat

dalam melaksanakan dan menggunakan Dana Desa (DD) tersebut agar menghasilkan pembangunan dan pemberdayaan yang semakin memajukan dan mensejahterakan masyarakat kedepannya.

Rumusan masalah yang dijadikan bahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok ?
2. Bagaimana dampak/pengaruh dana desa terhadap pembangunan fisik dan non-fisik di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok di tahun 2015-2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

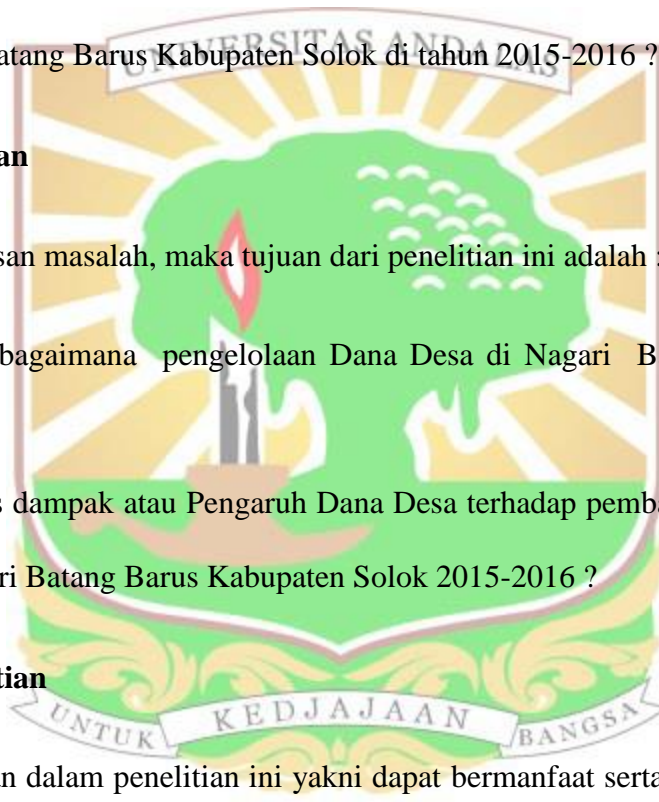
1. Mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok ?
2. Menganalisis dampak atau Pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan fisik dan non-fisik di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok 2015-2016 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah harapan dalam penelitian ini yakni dapat bermanfaat serta berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

a). Manfaat Teoritis

1. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis
2. Untuk pengembangan ilmu secara teoritis



b). Manfaat Metodologi

Manfaat metodologi ini diharapkan mampu menjadi acuan serta dapat menjadi bahan evaluasi guna pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Solok terutama di Nagari Batang Barus.

c). Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah terutama Nagari Batang dalam melaksanakan tata kelola Dana Desa agar tepat pada sasaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Topik utama dalam penelitian ini yakni **“Analisis Penaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Fisik dan Non Fisik Di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok.”**

Penelitian ini mencakup Nagari Batang Barus Kabupaten Solok.

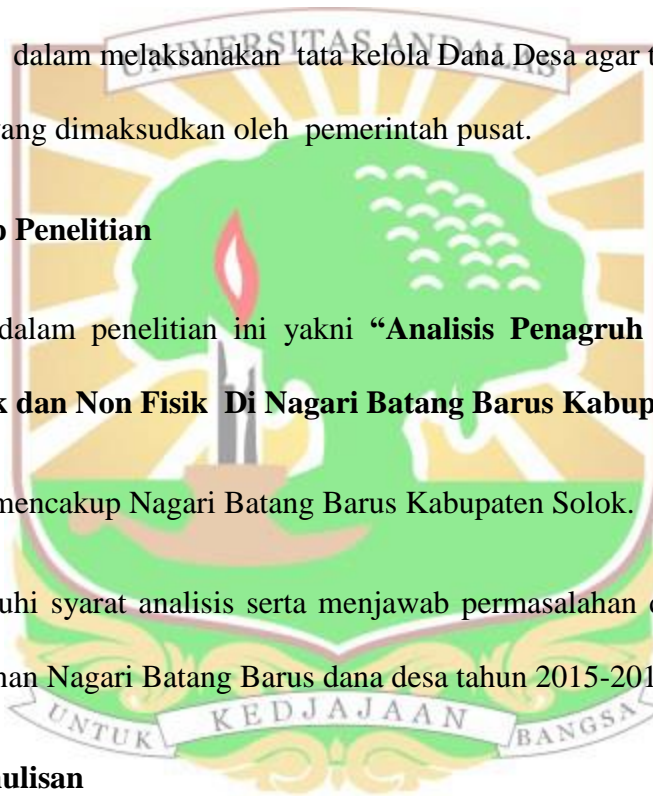
Untuk memenuhi syarat analisis serta menjawab permasalahan dari penelitian ini maka digunakan data tahunan Nagari Batang Barus dana desa tahun 2015-2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini yakni tentang analisis pengelolaan Dana Desa, akan dibagi dalam enam bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.



BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan tinjauan teoritis dan menyajikan penelitian yang terdahulu yang menjadi literatur dari penelitian ini.

BAB III **METODELOGI PENELITIAN**

Terdiri dari lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV **GAMBARAN UMUM**

Membahas tentang Gambaran Umum dari Lokasi penelitian

BAB V **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil dari penelitian, deskripsi objek penelitian, dan pembahasan.

BAB VI **KESIMPULAN DAN SARAN**

